

Konstruksi Identitas dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi dalam Intervensi Militer di Bahrain Tahun 2011

Aryo Bayu Sukarno

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: aryobayusukarno@gmail.com

Abstract

Penelitian ini akan membahas tentang intervensi militer GCC yang diinisiasi oleh Arab Saudi ke Bahrain pada 2011. Pada saat itu Bahrain sedang dilanda gelombang demonstrasi sebagai dampak dari revolusi musim semi di Timur Tengah. Intervensi Arab Saudi ini menjadi hal yang tidak biasa karena pasukan yang dikirim berusaha untuk meredam aksi demonstrasi yang terjadi di luar yurisdiksinya. Respon dramatis ini menarik perhatian banyak pihak khususnya yang berusaha untuk memahami kebijakan luar negeri Arab Saudi. Penelitian ini berusaha untuk melakukan analisa terhadap respon Arab Saudi tersebut melalui perspektif konstruktifis. Peneliti melihat pada aspek struktur normatif yang dimiliki oleh Arab Saudi demi menjelaskan alasan dibalik intervensi tersebut. Struktur normatif sendiri terdiri atas identitas dan norma perilaku negara dalam menghadapi sebuah kasus. Dalam hal ini adalah identitas Salafisme dan norma perilaku Arab Saudi dalam menghadapi aktivisme Syiah di dalam negerinya. Hal yang peneliti temukan adalah kaitan antara struktur normatif yang dimiliki Arab Saudi dengan memiliki korelasi dengan keputusan untuk melakukan intervensi. Aktivisme politik Syiah memicu reaksi dari struktur normatif Arab Saudi yang mengidentifikasinya sebagai ancaman dan segera melakukan tindakan koersif untuk meredamnya. Pola-pola penindakan represif yang umum di Arab Saudi ternyata diaplikasikan dalam kebijakan luar negerinya. Intervensi militer GCC di Bahrain menjadi contoh bagaimana struktur normatif internal sebuah negara berdampak pada negara lainnya.

Kata Kunci: Arab Saudi, Bahrain, GCC, Intervensi, Struktur Normatif

Identitas nasional melekat pada setiap negara bangsa di dunia. Identitas ini tercermin dalam banyak aspek di dalam negara tersebut seperti undang-undang, cara hidup, kultur masyarakat, dan sistem politik. Identitas nasional ini juga dapat terlihat dari kebijakan luar negeri sebuah negara karena identitas memberikan konstruksi terhadap kepentingan nasional.¹Bahrain menjadi pusat bagi perebutan pengaruh antara Sunni dan Syiah, dengan jumlah pengikut Syiah

¹William Wallace, "Foreign Policy and National Identity in the United Kingdom," *International Affairs*, Vol. 67, No. 1 (Jan., 1991): 66.

yang mencapai 70-75%.² Pada tahun 2011 terjadi *Arab Spring* yang memicu gelombang demonstrasi di Bahrain yang menyebabkan negara tersebut lumpuh. Kelompok Syiah yang didukung oleh Iran dan sekutunya melancarkan demonstrasi yang mendesak penggulingan pemimpin Sunni di wilayah tersebut. Menghadapi situasi yang berkembang maka pemimpin Arab Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab melalui bendera Gulf Cooperation Council (GCC) memutuskan untuk masuk ke Bahrain dan mengendalikan demonstrasi yang terjadi. Dalam tindakan ini Arab Saudi menjadi pihak yang paling banyak mengirimkan pasukan sehingga terlihat Arab Saudi merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini.

Momentum terjadi ketika dunia Arab dilanda revolusi pada tahun 2011. Gelombang revolusi ini menjalar hingga hampir seluruh negara Arab yang kebanyakan dipimpin oleh diktator atau monarki yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Bahrain menjadi salah satu negara yang terdampak langsung revolusi musim semi Arab pada tahun 2011. Komunitas Syiah di Bahrain menuntut untuk diturunkannya penguasa monarki dan dibukanya akses lebih besar kepada kekuasaan sebagai bagian proses demokratisasi. Simon Mabon menjelaskan bahwa terdapat dua fakta penting yang menjadikan Bahrain sebagai pusat perebutan antara Arab Saudi dan Iran, yaitu adalah perpecahan sektarian dan campur tangan Saudi-Iran melalui *proxy* di negara tersebut.³ Perpecahan sektarian menjadi isu pertama karena rakyat Bahrain yang didominasi oleh Syiah, menurut para penguasa monarki negara Teluk harus berada di bawah pemerintahan Sunni yang direpresentasikan dengan kepemimpinan Dinasti Al-Khalifa. Monarki Sunni di Bahrain membatasi ruang gerak bagi golongan Syiah, kelompok ini dihalangi untuk menjabat di instansi strategis di pemerintah dan secara sistematis mengutamakan naturalisasi

²Simon Mabon, "The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry", *Middle East Policy*, Vol. 29, No. 2, (Summer 2012): 84.

³Mabon, *op.cit.*, hlm. 89

masyarakat yang berallIranSunni untuk menjadi warga Bahrain.⁴ Arab Saudi juga menjadikan dinasti Al-Khalifa sebagai *proxy* negara tersebut untuk menekan pergerakan kaum Syiah karena kaum Syiah di Bahrain memiliki hubungan erat dengan Syiah yang ada di Timur Arab Saudi.⁵ Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang lain percaya dalam demonstrasi yang terjadi di Bahrain terdapat campur tangan Iran.⁶ Negara ini dianggap memiliki kepentingan untuk menyebarkan revolusi Iran dan pemikiran-pemikiran Ayatollah Khomeini kepada komunitas-komunitas Syiah di Timur Arab Saudi dan Bahrain, juga disaat yang sama mendelegitimasi kekuasaan penguasa Sunni. Negara-negara Teluk percaya bahwa kemenangan Syiah di Bahrain akan memunculkan gelombang perlawanan lanjutan dari golongan Syiah di Arab Saudi dan Kuwait.⁷

Demonstrasi besar yang terjadi di Bahrain dengan cepat diintervensi oleh Arab Saudi dengan mengirimkan tentaranya. Pada saat itu para demonstran menduduki Manama (pusat kota Bahrain) dan menjadikannya titik berkumpul puluhan ribu orang sehingga pemerintah Bahrain tidak mampu lagi untuk mengatasi gelombang demonstrasi.⁸ Melalui bendera Gulf Cooperation Council Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengirim 2.000 pasukan (1.200 dari Arab Saudi dan 800 dari UEA) yang bertugas untuk menertibkan berbagai aksi demonstrasi di Bahrain.⁹ Untuk pertama kalinya GCC sebagai organisasi keamanan aktif menggunakan pilihan aksi militer bersama untuk meredam konflik yang ada di salah satu anggotanya. Raja Abdullah bin Abdul

⁴*Ibid*, hlm. 85

⁵*Ibid*, hlm. 87

⁶Brandon Friedman, "Battle For Bahrain What One Uprising Meant for the Gulf States and Iran," *World Affairs*, Vol. 174, No. 6 (March/April 2012): 75.

⁷Ethan Bronner And Michael Slackman, "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest," *New York Times*. March 14, 2011, <http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15Bahrain.html>. (Diakses pada 17 Maret 2017)

⁸Martin Chulov, "Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising," *The Guardian*, March 14, 2011, <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/14/saudi-arabian-troops-enter-Bahrain>. (Diakses pada 17 Maret 2017)

⁹Bronner dan Slackman, *loc.cit*

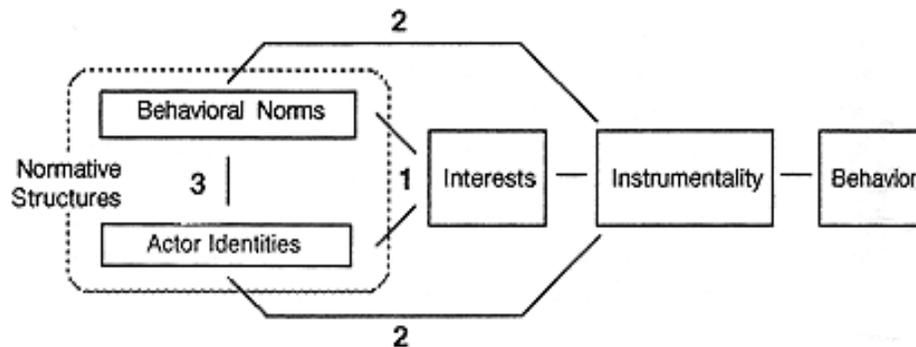
Aziz menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan pihak-pihak yang ingin mengobarkan konflik sektarian dan melakukan pecah belah terhadap negaranya.¹⁰ Secara terbuka pemimpin Bahrain menunjuk Iran sebagai dalang dari kekacauan yang terjadi di negaranya, pembuktian ini didapatkan dari kontak informasi antara Al-Alam (stasiun televisi Iran yang berbahasa Arab), Al-Manar (stasiun berita Hezbollah di Lebanon), dan oposisi di dalam negeri yang melakukan agitasi terhadap populasi Syiah di Bahrain.¹¹ Setelah aksi demonstrasi berhasil dihentikan Iran juga secara aktif tetap menyalahkan Arab Saudi sebagai pihak yang melakukan pengingkaran terhadap kedaulatan sebuah negara. Secara tegas pejabat dari Arab Saudi menyatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa Iran terlibat dalam demonstrasi ini.¹² Terdapat ketakutan yang umum di negara Teluk bahwa kelompok Syiah di wilayah mereka sengaja untuk dimobilisasi sebagai upaya untuk menggulingkan penguasa.

¹⁰Mohamed Fadel, "Saudi Arabia and the UAE send troops to Bahrain to contribute to security," Middle East Online, March 14, 2011, <http://www.middle-east-online.com/?id=106782>. (Diakses pada 29 Maret 2017)

¹¹Chulov, *op.cit.*, hlm. 76.

¹²Bronner dan Slackman, *loc.cit.*

Gambar 1.1 Hubungan antara Struktur Normatif dan Perilaku Negara



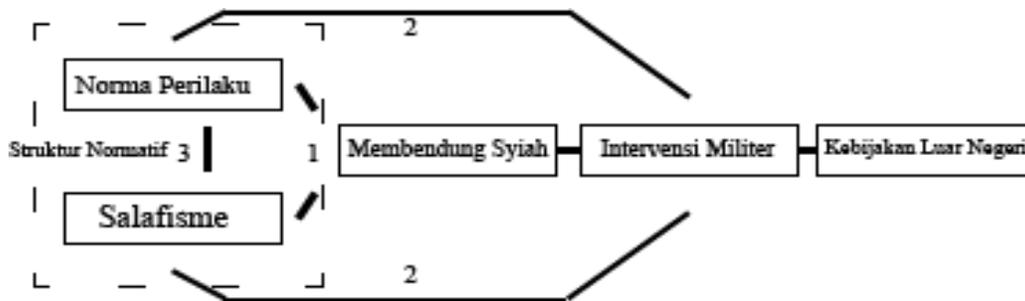
Sumber: Paul Kowert and Jeffrey Legro, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996)

1. Struktur Normatif membentuk kepentingan
2. Struktur Normatif menentukan pilihan instrumen yang digunakan
3. Identitas dan Norma saling mempengaruhi

Gambar 1.1 memperlihatkan mekanisme kebijakan luar negeri dari faktor struktur normatif. Terdapat tiga kategori yang terlihat di gambar tersebut yaitu: (1) Norma-perilaku dan identitas aktor menentukan kepentingan apa yang harus dicapai oleh subjek tersebut. *Norms may even shape an actor's interests or preferences in ways that contradict the strategic imperative of the international environment.*¹³ (2) Disaat yang sama struktur normatif yang terdiri dari norma perilaku dan identitas menentukan instrumen apa yang lebih diprioritaskan oleh negara tersebut. Sebuah negara cenderung memilih instrumen yang sesuai dengan dirinya dan sudah biasa dilakukan di masa lalu. Hal ini pada akhirnya menjadi perilaku dari negara tersebut. (3) norma perilaku dan identitas aktor pada akhirnya saling membentuk satu dengan yang lainnya dan saling menyesuaikan.

¹³*Ibid*, hlm. 369.

Gambar 1.2 Skema Hubungan Struktur Normatif Arab Saudi dan Kebijakan Luar Negeri



1. Norma perilaku dan Salafisme membentuk kepentingan untuk membendung pengaruh Syiah
2. Struktur Normatif menentukan pilihan instrumen yang digunakan
3. Salafisme dan Norma perilaku saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya

Dalam kasus intervensi Arab Saudi di Bahrain dapat dilihat adanya kesesuaian dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya. Pada gambar 1.2 terlihat bahwa Arab Saudi memiliki struktur normatif yang terdiri dari dua hal yaitu identitas salafi dan norma perilakunya. Identitas Salafi menjadi dasar sikap bermusuhan dan curiga terhadap kelompok Syiah baik itu domestik atau di luar negeri. Norma perilaku Arab Saudi terlihat dari kebijakan dalam negerinya yang melakukan sikap represif dan marginalisasi terhadap kelompok Syiah. Oleh peneliti norma perilaku ini akan disebut sebagai norma perilaku. Norma perilaku dapat didefinisikan sebagai tata aturan perilaku yang biasanya dihadapkan pada situasi tertentu, Norma ini dapat berbentuk aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Hal ini peneliti bagi dalam tiga kategori yang ditunjukkan oleh gambar 1.2 yaitu: (1) Kedua elemen dari struktur norma tersebut membentuk kepentingan Arab Saudi untuk menghalangi kelompok Syiah . (2) Instrumen yang digunakan dalam intervensi di Bahrain juga memiliki kesesuaian dengan norma perilaku yang Kerajaan Arab Saudi yang melakukan aksi represif di dalam negeri. Identitas dan norma yang biasanya di dalam negeri diterapkan dengan instrumen kekerasan maka dampak ke luar negerinya kemungkinan

menggunakan instrumen tersebut. Bisa dilihat bahwa intervensi yang dilakukan Arab Saudi memiliki kesesuaian dengan teori struktur normatif. (3) pada bagian terakhir menunjukkan adanya pengaruh antara norma perilaku dan salafisme dalam politik domestik di Arab Saudi yang satu dengan lainnya memiliki kesesuaian satu dengan yang lain.

Salah satu yang dianggap sebagai ancaman utama dari prinsip Tauhid adalah golongan Syiah. Dasar ideologis ini yang menjadi landasan kekhawatiran ulama-ulama Salafi terhadap kelompok Syiah. Dalam konsepsi Salafi terdapat pembagian sederhana di dunia ini, yaitu yang beriman dan yang kafir. Kelompok yang dianggap menyalahi aturan Sunnah merupakan ancaman terhadap kelompok orang-orang beriman. Kelompok Salafi selalu curiga terutama terhadap kelompok Syiah yang banyak dianggap menyebar bidah dan kesyirikan.¹⁴ Dalam konsepsi Salafi yang terlihat dari pernyataan-pernyataan ulama-ulama Arab Saudi sebelumnya tampak jelas bahwa mereka memandang kelompok Syiah berusaha untuk berkonspirasi menjatuhkan kelompok Sunni. Fatwa yang dikeluarkan ketika demonstrasi terjadi di Bahrain juga merujuk pada sebuah entitas asing yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, dan berdasarkan situasi yang terjadi entitas yang dirujuk ini adalah kelompok Syiah.¹⁵

Identitas Arab Saudi sebagai negara yang menjadikan Islam (secara khusus Salafisme) sebagai dasar landasan negara berpengaruh terhadap persepsi Syiah sebagai ancaman. Madawi Al-Rasyeed menulis bahwa terdapat berbagai hal yang mengindikasikan identitas berpengaruh terhadap persepsi ancaman kelompok Syiah terhadap Arab Saudi. Para pemuka keagamaan Arab Saudi menyatakan bahwa kelompok-kelompok Syiah sedang melakukan upaya konspirasi untuk

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Irfan al-Alawi, *op.cit.*

melemahkan kelompok Sunni.¹⁶ Tuduhan ini walaupun tidak berdasar tetapi banyak dinyatakan oleh ulama-ulama Sunni di Arab Saudi. Tuduhan ini berdasarkan pada prasangka yang umum di temukan pada ulama-ulama Salafi. Wahabbi seperti yang diketahui merupakan pihak yang paling keras terhadap kelompok Syiah. Muhammad Al-Arifi dan Yusif Al-Ahmad yang merupakan tokoh-tokoh ulama Salafi melakukan pengecaman terhadap kelompok-kelompok syiah, yang itu disebarkan melalui masjid-masjid lokal, kuliah umum dan disebarkan melalui Youtube.¹⁷ ulama-ulama lain Salafi lain juga mengatakan hal yang sama bahwa kelompok Syiah berusaha berkonspirasi untuk memecah belah Arab Saudi dan negara-negara Sunni lainnya.

Ulama kerajaan yang tergabung dalam dewan ulama tinggi mengeluarkan fatwa yang lebih tidak langsung, tetapi jelas.¹⁸ Dewan ulama menyatakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk melawan pemerintah merupakan pelanggaran hukum agama yang berarti hal itu berbuat dosa. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh dewan ulama, mereka merujuk pada hadits yang menerangkan bahwa jika terjadi perpecahan sesama muslim maka pemerintah dapat bertindak tegas terhadap kelompok tersebut. "The Prophet again said: 'He who wanted separate affairs of this nation who are unified, you should kill him with [the] sword whoever he is' (narrated by Muslim)."¹⁹ Landasan dari fatwa ini yang membenarkan tindakan untuk memberantas berbagai aksi yang dianggap memecah belah kerajaan dengan cara kekerasan. Menarik melihat bahwa perawi dari hadits ini adalah Ibn Al-Hajjaj – sosok yang kontroversial dalam sejarah muslim dimana dia dikenal sebagai pemimpin yang cakap tetapi otoriter.²⁰ Penggunaan hadits ini secara singkat coba dianalisa oleh Irfan al-Alawi dalam tulisannya di *The*

¹⁶Madawi Al-Rasheed, "Secterianism As Counter-Revolution:Responses To The Arab Spring", dalam *Studies In Ethnicity And Nationalism* . Vol.11, No. 3, (2011)

¹⁷*Ibid*, hlm. 521.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*.

Guardian. Al-Alawi menemukan bahwa fatwa kerajaan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk memberantas bahkan membunuh orang-orang yang dianggap berusaha memecahbelah kaum muslim. Pernyataan tegas diberikan pada kesimpulan fatwa tersebut yang berbunyi "The council affirms prohibition of the demonstrations in this country and [that] the legal method which realises welfare without causing destruction rests on mutual advice."²¹ Fatwa ini juga menganjurkan untuk memilih cara koorporasi dengan pemerintah agar terdapat hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya.

Implikasi ideologi ini yang berasal dari pandangan Salafi ini bisa berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil Kerajaan langkah-langkah represif yang diambil Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan pandangan ulama Kerajaan yang melihat Syiah sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya. Kebijakan tegasyang diambil pihak kerjaan merupakan upaya untuk melawan konspirasi yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan sekutunya Iran. Penulis berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh ulama Arab Saudi sesuai dengan langkah yang diambil Kerajaan asumsi yang mendasari ini adalah secara ideologis, Kerajaan sudah memandang kelompok Syiah sebagai ancaman. Asumsi-asumsi ini ditegaskan terus oleh ulama Salafi yang berasal dari dewan ulama kerajaan Arab Saudi sebagai bagian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan pandangan jelas mengenai persepsi adanya ancaman.

Ideologi Salafi dalam kebijakan intervensi di Bahrain terlihat dari asumsi dasar yang melandasi kebijakan tersebut. Asumsi yang dimiliki Salafi bahwa kelompok Syiah berusaha untuk berkonspirasi menjatuhkan negara-negara Sunni. Seperti yang dikatakan oleh Dorran bahwa kelompok Salafi secara terus menerus merasa dalam ancaman.²² Ancaman ini berasal dari kelompok syiah dan kelompok lain yang dianggap tidak beriman dan berusaha untuk

²¹*Ibid.*

²² Dorran, *op.cit*

menjatuhkan kelompok beriman. Syeikh Abd al-Aziz ibn Baz – *Grand Mufti Arab Saudi* (1993-1999) – mengeluarkan pendapat bahwa hubungan dengan para pengikut Syiah merupakan sesuatu yang berbahaya.²³ Syeikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa “Rafidah (Syiah) at present are the people who hold false creeds, the filtiest, most evil, and the most dangerous of this they worship the family besides Allah,... they slaughter the sacrifice and cure the sick (and they invoke them saying) O Ali, O Hasan, O Fatima”.²⁴ Pernyataan dari Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah secara jelas mengkategorikan Syiah sebagai golongan yang memiliki pemahaman yang sesat. Penyebutan keluarga nabi seperti Fatimah, Ali, dan Husein dalam berbagai praktek peribadatan membuat mereka mengingkari Allah menurut Syeikh Abdul Aziz.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Bahrain dianggap sebagai bagian dari konspirasi kelompok Syiah yang ingin menjatuhkan negara-negara Sunni. Padahal, yang diinginkan kelompok syiah adalah demokrasi dan hak-hak politik yang lebih besar lagi bagi kelompok tersebut.²⁵ walaupun tuntutan kelompok Syiah di Bahrain sifatnya lokal tetapi pemerintah Arab Saudi yang sudah khawatir melihat bahwa ada agenda Syiah secara regional. Agenda Syiah regional yang sering disebut dengan bulan sabit Syiah menjadi ketakutan utama bagi monarki Sunni para penguasa Sunni ini melihat khususnya Arab Saudi bahwa Syiah menjadi ancaman bagi kelangsungankerajaan. Menanggapi berbagai kekacauan yang dibuat oleh kelompok Syiah Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah – Mufti Arab Saudi (1999 - sekarang) – menyatakan bahwa kelompok Syiah bukanlah muslim, melainkan Majusi, Kelompok ini adalah agama masyarakat Iran kuno yang melakukan penyembahan terhadap api. “We must understand these are not

²³Salafi Centre of Manchester, “Shaikh Ibn Baaz about the Aqeedah of the Raafidah,” *Youtube*. 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=3z6gy28pLQw>.

²⁴*Ibid.*

²⁵Neuman, *op.cit.*

aksi demonstrasi kecil yang merupakan bagian dari Arab Spring dihadapi dengan cara yang sama.

Arab Saudi terlihat konsisten dengan pola-pola represif pembubaran demonstrasi. Instrumen kekerasan selalu dipilih sebagai cara yang digunakan kelompok Syiah secara politik. Cara ini digunakan sebagai instrumen yang juga dipilih dalam kebijakan luar negeri. Pada gambar 4.1 diatas terlihat bagaimana skema struktur normatif diaplikasikan dalam kebijakan luar negeri. Dalam hal yang terjadi di Arab Saudi terdapat dua garis besar struktur normatif yang dapat diidentifikasi. Pertama adalah identitas Arab Saudi yaitu Salafi dengan keberadaan kelompok Syiah. Ideologi ini menjadi dasar ketakutan asumsi yang berasal dari pandangan Salafi ini mempengaruhi persepsi ancaman dari kelompok Syiah terlepas nyata atau tidaknya ancaman tersebut. Struktur Normatif menjadi pola-pola aturan pemerintah yang tidak tertulis. Pemerintah Arab Saudi yang selalu menindak demonstrasi Syiah dengan kekerasan. Membawa pola ini ke dalam kebijakan luar negerinya. Bahrain ketika itu yang dilanda demonstrasi Syiah ditindak dengan cara yang sama dengan menggunakan bendera GCC. Organisasi regional ini hanya dijadikan landasan legitimasi pemerintah Arab Saudi untuk masuk ke Bahrain.

Bisa dikatakan bahwa Arab Saudi menerapkan pola kebijakan domestik yang sama dengan kebijakan luar negerinya. Respon Arab Saudi terhadap situasi yang berkembang di Bahrain melalui kebijakan intervensi militer dapat dilihat merupakan respon dari rasa ketakutan terhadap perkembangan kelompok Syiah. Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi sebenarnya beralasan dan sudah dapat diperkirakan. Hal ini penulisdasarkan pada beberapa fakta di lapangan yang menunjukkan perilaku ketakutan terhadap berbagai kemajuan yang diperoleh kelompok Syiah. Indikator dari hal ini dapat dilihat dari pernyataan pejabat publik Arab Saudi dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Arab Saudi. Tanda-tanda ini ada dari pernyataan pejabat Saudi

yang khawatir terhadap populasi Syiah yang terus diprovokasi oleh Iran. Narasi ini terus didengungkan Arab Saudi dalam berbagai tindakannya dalam menghalangi kemajuan politik yang didapat kelompok Syiah baik di dalam ataupun di luar negeri

Mengukur respon Arab Saudi terhadap demonstrasi yang terjadi di Bahrain dapat terlihat pola yang sama dengan cara penindakan terhadap kelompok Syiah di dalam negeri. Pola yang terlihat jelas ini adalah dari penggunaan kekerasan untuk menghentikan aktivitas kelompok Syiah. John Kifner dalam New York Times tahun 1987 melaporkan bahwa 400 orang yang didominasi oleh kelompok Syiah meninggal dalam demonstrasi yang terjadi di Mekkah.²⁸ kelompok Syiah ini melakukan demonstrasi di Mekkah untuk memprotes kepemimpinan dinasti Saud. Kelompok ini secara tegas langsung ditertibkan oleh aparat keamanan. Arab Saudi secara tegas tidak mentolelir aktivitas kelompok Syiah di negaranya. Kerajaan selalu menindak aksi demonstrasi kelompok Syiah dengan kekerasan. Hal yang sama juga terjadi secara berulang kali dengan beberapa demonstrasi lainnya yang juga dilakukan oleh kelompok Syiah. Toby Jones menulis tentang pemberontakan Syiah di Arab Saudi. Pada November 1979 terjadi bentrokan berdarah antara pasukan keamanan dan kelompok Syiah yang frustrasi.²⁹ Bentrokan ini terjadi di kota-kota di Provinsi timur. Demonstrasi dan aksi anarkis ini terjadi bersamaan dengan hari Ashura. Demonstrasi ini menimbulkan instabilitas terhadap keamanan domestik yang selama ini stabil. Kerajaan mengirimkan 20.000 pasukan keamanan untuk mengatasi kerusuhan yang semakin meluas dan tidak terkendali.³⁰. Beberapa kejadian ini juga terulang ketika terjadi revolusi Arab pada tahun 2011. Pasukan Arab Saudi melarang berbagai aktivitas politik yang mengancam kekuasaan Arab Saudi. Namun yang terjadi pada

²⁸Kiefner, *op.cit.*

²⁹Jones, *op.cit.* hlm. 213.

³⁰*Ibid.*

tahun itu ketika negara-negara Arab lainnya dilanda revolusi penjagaan ketat aparat keamanan berhasil mencegah ketidakpuasan yang ada untuk meluas.

Ketakutan yang muncul dari Arab Saudi dilandasi oleh landasan ideologis yang memandang bahwa kaum kafir mengancam kaum beriman. Salafisme secara konstan melihat bahwa ada pertarungan antara benar dan salah. Dalam hal ini Arab Saudi melihat kelompok Syiah sebagai pihak yang selalu mengancam keberadaan pihak yang beriman. Kelompok Syiah digolongkan sebagai kelompok yang ingin berkonspirasi untuk menjatuhkan para penguasa muslim. Konspirasi ini dilakukan dalam banyak bentuk seperti demonstrasi dan aksi-aksi lain yang menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat yang diharapkan berujung pada penjatuhan penguasa muslim. Aktivitas politik kaum Syiah harus dibatasi karena mengancam keamanan masyarakat Sunni. Masyarakat Syiah melalui dukungan utama oleh Iran berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah yang dimiliki oleh kelompok muslim. Mereka menginginkan untuk mengeksport revolusi Iran dimana menjadikan pemikiran Khomeini sebagai landasannya, hal ini berarti menyingkirkan para penguasa Sunni yang sudah berkuasa dalam waktu yang lama. Ambisi kekuasaan orang-orang Syiah juga tercermin dalam upaya untuk membentuk bulan sabit Syiah yang terbentang dari Iran hingga ke Lebanon.

Instrumen kekerasan lebih dipilih karena hal itu yang selalu dilakukan untuk menghadapi demonstrasi yang dilakukan kelompok Syiah di dalam negeri. Pola represif ini dilakukan secara berulang ulang oleh Arab Saudi dan pertama kalinya diterapkan dalam kebijakan luar negeri untuk mengatasi demonstrasi di Bahrain. Tidak menutup kemungkinan pola kekerasan akan digunakan untuk menghadapi aktivitas politik kaum Syiah di tempat lain. Kekerasan selalu dipilih dan terbukti efektif dalam mengurangi gelombang protes yang dimobilisasi oleh kelompok Syiah. Pola kekerasan juga terbukti efektif dalam meminimalisir dampak yang

ditimbulkan dari upaya-upaya kelompok Syaiah untuk menimbulkan ketidakstabilan politik. Disamping penggunaan kekerasan terdapat berbagai cara lain yang digunakan untuk menahan laju ekspansi orang-orang Syiah salah satunya adalah melalui fatwa. Dewan ulama Arab Saudi merupakan institusi keagamaan yang sering merespon isu yang berkembang. Ketika demonstrasi pecah di Bahrain secara cepat dewan ulama segera mengeluarkan fatwa larangan berdemonstrasi karena akan mengganggu persatuan umat Islam. Di dalam fatwa disebutkan bahwa terdapat pihak luar yang ingin agar umat Islam terpecah antara satu dengan yang lainnya dan mereka akan mengambil keuntungan dari hal tersebut.

Kebijakan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi merefleksikan konstruksi dan persepsi yang dimiliki oleh Arab Saudi. Fatwa ulama yang secara berulang kali memvonis kaum Syiah sebagai kafir dan majusi menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap masyarakat Syiah. Pernyataan keras ini juga dilontarkan oleh dua mufti besar Arab Saudi terakhir yaitu Syeikh Abdulaziz bin Baz dan Syeikh Abdulaziz bin Adullah. Pernyataan kedua ulama ini bisa dikatakan merupakan posisi dari pemerintah Arab Saudi karena keduanya merupakan rujukan utama fatwa di kerajaan yang posisinya selalu diikuti oleh masyarakat dan para pembuat kebijakan. Perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syiah dipandang sebagai dasar utama untuk tidak mempercayai kelompok-kelompok Syiah. Syeikh Abdulaziz bin Baz secara terang-terangan menyebut perilaku syirik yang dilakukan para pengikut syiah ini merupakan hal yang sesat dan berbahaya.³¹ Kaum Syiah berusaha untuk menarik orang-orang Sunni agar saling berperang antara satu dengan yang lainnya dan disaat yang sama mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari perseteruan ini. Syeikh Abdulaziz bin Adullah, mufti besar Arab Saudi yang sekarang dalam secara terbuka menyatakan bahwa Khomeini dan para pengikutnya

³¹ Lihat halaman 43

(Syiah) merupakan orang-orang yang memang bukan muslim ketika ditanya tentang perbuatan orang-orang Syiah yang ingin membuat kekacauan di tanah suci.³² Pernyataan-pernyataan ini secara langsung mengungkapkan pandangan yang sama dengan teks-teks Salafi pada umumnya. Pandangan dari ulama-ulama tinggi di Kerajaan Arab Saudi secara tegas mengungkapkan rasa tidak senangnya terhadap perkembangan kelompok Syiah dan aktivisme yang dilakukannya. Rasa tidak senang ini memicu berbagai tindakan yang dilakukan untuk menahan laju ekspansi pengaruh Iran dan Syiah yang berkembang di Timur Tengah.

Penulis melihat bahwa dasar ideologi Salafi merupakan penggerak utama kebijakan Arab Saudi terhadap Syiah. Seperti yang dikatakan oleh Alexander Wendt bahwa identitas menentukan identifikasi musuh dan kawan.³³ Ideologi Salafi memiliki identifikasi tersendiri yang didasarkan oleh akidah atau kepercayaan. Landasan ini didasarkan atas Quran dan Hadits, kelompok yang sesuai dengan keduanya dianggap sebagai pihak yang lebih dekat dengan kelompok salaf. Namun, Syiah yang lebih mengutamakan para imamnya dibanding dengan kedua warisan nabi tersebut dianggap sebagai pihak yang bermusuhan dengan ideologi Salaf. Pengingkaran dan bidah yang dilakukan oleh masyarakat Syiah memancing perlawanan dari kelompok Salaf yang ingin menjaga kemurnian agama Islam. Selanjutnya ideologi ini merasuk ke dalam struktur kenegaraan Arab Saudi yang tercermin dalam kebijakan luar negerinya untuk melakukan pembendungan terhadap kelompok Syiah.

Daftar Pustaka

Al-Alawi, Irfan. "Saudi Arabia's Anti-protest Fatwa is Transparent," *The Guardian*, 2011, <https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/apr/01/saudi-arabia-anti-protest-fatwa>.

³²Payton, *op.cit.*

³³Wendt, *op.cit.*

- Al-Rasheed, Madawi. "The Shi'a of Saudi Arabia: a Minority in Search of Cultural Authenticity." *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 25, No. 1 (1998): 121-138.
- Al-Rasyheed, Madawi. "Secterianism as Counter-Revolution: Responses To The Arab Spring." *Studies In Ethnicity And Nationalism*. Vol.11, No. 3 (2011).
- American for democracy for human rights in Bahrain, "Why Saudi Arabian the Democratic Uprising in Bahrain." *adhr.org*.2015. www.adhrb.org/2015/02/why-saudi-arabia-crushed-the-democratic-uprising-in-bahrain/.
- Arangko, Tim. "Iran Dominates in Iraq After U.S. 'Handed the Country Over'", *New York Times*. 2017. <https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html>.
- Blanchard, Christopher M. "US Congress, The Islamic Traditions of Salafism and Salafiyya", *US Congress*. January 24, 2008, Congressional Research Service.
- Bradley, John R., *Saudi Arabia Exposed Inside a Kingdom in Crisis*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Bronner, Ethan And Michael Slackman. "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest," *New York Times*. March 14, 2011, <http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15Bahrain.html>. (Diakses pada 17 Maret 2017).
- Brunner, Rainer. "Shiism in the Modern Context: From Religious Quietism to Political Activism", dalam *Religion Compass* 3/1 (2009).
- Chulov, Martin. "Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising." *The Guardian*, March 14, 2011, <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/14/saudi-arabian-troops-enter-Bahrain>. (Diakses pada 17 Maret 2017).
- Commins, David. *The Salafi Mission and Saudi Arabia*. New York & London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2006.
- Doran, Michael Scott. "The Saudi Paradox", *Foreign Affairs*, Vol. 83, No. 1 (2004): 39.
- Fadel, Mohamed. "Saudi Arabia and the UAE Send Troops to Bahrain to Contribute to Security," Middle East Online, March 14, 2011, <http://www.middle-east-online.com/?id=106782>. (Diakses pada 29 Maret 2017).
- Falomir-Pichastor, Juan Manuel. "Perceived In-group Threat as a Factor Moderating the Influence of In-group Norms on Discrimination Against Foreigners." *European Journal of Social Psychology*, Vol. 34(2004): 135–153.
- Friedman, Brandon. "Battle For Bahrain What One Uprising Meant for the Gulf States and Iran," *World Affairs*, Vol. 174, No. 6 (2012): 75.
- Jahner, Ariel. "Saudi Arabia And Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf," *International Affairs Review*, Vol.20, No. 3 (2012).

- Jones, Toby. "Rebellion on the Saudi Periphery: Moderenity, Marganitazion, And The Shi'a Uprising og 1979." *International Journnal of middle east studies* (2006).
- Kifner, John. "400 Die as Iranian Marchers Battle Saudi Police In Mecca; Embassies Smashed in Teheran." *New york Times*. 1987<http://www.nytimes.com/1987/08/02/world/400-die-iranian-marchers-battle-saudi-police-mecca-embassies-smashed-teheran.html?pagewanted=all>.
- Kowert, Paul and Jeffrey Legro. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press, 1996.
- Mabon, Simon. "The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry." *Middle East Policy* Vol. 19, No. 2 (2012): 84.
- Finnemore, Martha. *The Purpose Of Intervention: Changing Beliefs About The Use Of Force*. Ithaca And London: Cornell University Press, 2003.
- Neumann, Ronald E. "Bahrain: Very Complicated Little Island." *Middle East Policy*, Vol. 20, No. 4 (2013).
- Nevo, Joseph. "Religion and National Identity in Saudi Arabia." *Middle Eastern Studies*, Vol. 34, No.3 (1998):34.
- Norris, Pippa, "Young People & Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics of Choice?", *John F. Kennedy School of Government, Harvard University* (2003).
- Osiewicz, Przemysław. "Ideological Determinants of the Current Saudi-Iranian Rivalry in the Middle East." 2016. <http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/viewFile/7246/7263>,
- Payton, Matt. "Iranians are not Muslims', says Saudi Arabia's Grand Mufti." *BBC*, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-grand-mufti-Iran-Sunni-muslims-hajj-a7229416.html>.
- Stratfor video. "Footage of Saudi Military Convoy Entering Bahrain," *Youtube*.2011. <https://www.youtube.com/watch?v=gwpJXpKVfWE>.
- Takeyh, Ray. *Guardians of the revolution : Iran and the world in the age of the Ayatollahs*. New York: Oxford University Press, Inc., 2009.
- Tillema, Herbert K. "Foreign Overt Military Intervention in the Nuclear Age." *Journal of Peace Reseach*. Vol. 26, No.2 (1989).
- Wallace, William. "Foreign Policy and National Identity in the United Kingdom", *International Affairs*, Vol. 67, No.1 (1991): 66.
- Wehrey, Frederic. "the Forgotten Uprising in Eastern Saudi Arabia." *Carnegie Endowment For International Peace*, 2013.
- Wendt, Alexander. "Anarchy is What States Make of it: the Social Construction of Power Politics." *International Organization*, Vol. 2, No. 46 (1992).

Zweiri, Mahjoob & Mohammed Zahid.*the Victory of Al Wefaq: The Rise Of Shiite Politics In Bahrain*. Athens: Research Institute For European And American Studies, 2007.